

Analisis Keuangan Pemerintah Daerah Kota Padang Untuk Mengukur Kinerja Keuangan Daerah

Arnaldi¹⁾, Irdha Yusra²⁾

¹ Fungsional Analis Keuangan Pusat dan Daerah BPKAD Kota Padang

² Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi KBP

arnaldi22011966@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to assess the financial performance of Padang City Government using Financial Ratio Analysis of Regional Budget for Fiscal Year 2014 – 2018. Type of research is descriptive qualitative with case study approach. The processed data is the budget Report of Padang City Government for Fiscal Year 2014 – 2018 were obtained from the internet publication on the official website of financial management board and regional property of Padang City. The analysis used to analyze the regional financial performance is financial analysis by calculate the ratio of independence, Degree of Fiscal Decentralization, Ratio of Efficiency and Ratio of Expenditure Congruence. While the analysis used to analyze the Ability of Regional Finance is to calculate the Share and Growth, Map of Regional Finance Copability and, Based on the calculation and analysis of the Regional Financial Performance can be concluded that the pattern of the region's autonomy level relationships in Padang City is instructive criteria. Degree of Fiscal Decentralization is still lacking, but the Ratio of Efficiency is also not efficient. Ratio of Expenditure Congruence shows the balance between expenditures are not balanced. Based on the calculation and analysis of the Regional Financial Copability can be concluded, that the condition of financial ability of Padang City is still not ideal. Share and Growth calculation results, the position of Padang City in quadrant III.

Keywords: *Financial Ratio Analysis of Regional Budget, Financial Performance of Local Government.*

Detail Artikel:

Diterima : 14 Agustus 2019

Disetujui : 08 November 2019

DOI:10.31575/jp.v4i1.182

PENDAHULUAN

Sesuai dengan Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dalam Pasal 1 ayat 5 bahwa Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pemerintah Daerah dituntut untuk menjalankan roda pemerintahan dengan kinerja yang baik, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pemerataan pembangunan dengan mengembangkan seluruh potensi yang dimiliki oleh masing – masing daerah. Sehingga mampu mendorong masyarakat untuk berperan serta dalam melaksanakan pembangunan.

Sistem pengukuran kinerja sektor publik adalah sistem yang bertujuan untuk membantu manajer publik menilai pencapaian suatu strategi melalui alat ukur finansial dan non-finansial. Pengukuran kinerja sektor publik dilakukan untuk memenuhi tiga

maksud: *Pertama*, pengukuran kinerja sektor publik dimaksudkan untuk membantu memperbaiki kinerja pemerintah. Ukuran kinerja dimaksudkan untuk dapat membantu pemerintah berfokus pada tujuan dan sasaran program unit kerja. Hal ini pada akhirnya akan meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi sektor publik dalam memberikan pelayanan sektor publik. *Kedua*, ukuran kinerja sektor publik digunakan untuk mengalokasikan sumber daya dan pembuatan keputusan. *Ketiga*, ukuran kinerja sektor publik dimaksudkan untuk mewujudkan pertanggungjawaban publik dan memperbaiki komunikasi kelembagaan (Ulum, 2009).

Tuntutan yang tinggi terhadap kinerja dan akuntabilitas kinerja daerah Pemerintah Daerah berusaha untuk meningkatkan kinerja yang baik. Untuk mengukur tingkat kemampuan kinerja Pemerintah Daerah diperlukan suatu teknik pengukuran kinerja salah satu teknik untuk menganalisis laporan keuangan Pemerintah Daerah adalah Analisis rasio Keuangan, Analisis Rasio Keuangan adalah cara analisa dengan menggunakan perhitungan-perhitungan perbandingan atas data kuantitatif terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Rasio keuangan ini hanya menyederhakan informasi yang menggambarkan hubungan antara pos tertentu dengan pos lainnya. Dengan penyederhanaan ini kita dapat menilai secara cepat hubungan antara pos dan dapat membandingkannya dengan rasio lain sehingga kita dapat memperoleh informasi dan memberikan penilaian. Penelitian ini hanya dibatasi pada perhitungan Rasio Keuangan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Daerah Kota Padang Tahun Anggaran 2014-2018.

Pada dasarnya rasio-rasio keuangan adalah untuk menilai kinerja keuangan dimasa lalu, saat ini dan kemungkinan dimasa depan (Saputra & Martha, 2019; Yusra, 2016). Analisis Rasio Keuangan terhadap APBD ini dilakukan dengan cara menghitung kinerja keuangan daerah dan kemampuan daerah. Untuk menghitung kinerja keuangan daerah dengan menghitung ; Rasio kemandirian keuangan daerah, Rasio ketergantungan keuangan daerah, Rasio Desentralisasi fiskal, Rasio Efisiensi, Rasio Keserasian Belanja tidak langsung terhadap total belanja, dan Rasio belanja langsung terhadap total belanja terhadap APBD. Sedangkan Analisis kemampuan keuangan daerah dengan cara menghitung pertumbuhan (*growth*), Analisis peranan (*share*), dan Peta kemampuan keuangan daerah. Kemudian dari masing – masing perhitungan dideskripsikan data dari hasil perhitungan rasio keuangan. Analisis Rasio Keuangan terhadap APBD diharapkan dapat menjadi salah satu alat ukur untuk menilai kinerja keuangan pemerintah daerah kota Padang dan pedoman bagi Pemerintah Daerah kota Padang dalam menyusun dan menetapkan APBD yang akan datang.

Tabel 1
Indikator Kinerja Keuangan Daerah Tahun 2018

No	Uraian	Indikator Kinerja	Ket.	Pencapaian
1.	KemandirianKeuangan Daerah	40,01%-50,00%	Baik	41,87 % (Baik)
2.	KetergantunganKeuangan Daerah	40,01%-50,00%	Tinggi	70,18%(Sangat Tinggi)
3.	Tingkat DesentralisasiFiskal	40,01%-50,00%	Baik	25,83% (Sedang)
4.	EfisiensiPengelolaanKeuangan Daerah	60,00%-80,00%	Efisien	102,56% (Tidak Efisien)
5.	AnalisisPertumbuhan(<i>growth</i>)	40,01%-50,00%	Tinggi	0,20 % (Sangat rendah)
6.	AnalisisPeranan (<i>share</i>)	40,01%-50,00%	Tinggi	25,18% (Sedang)

Analisis Keuangan Pemerintah ... (Arnaldi, Yusra)

ISSN: 2556 - 2278

Berdasarkan indikator kinerja keuangan daerah tahun 2018 di atas maka kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kota Padang untuk tahun 2018 adalah: Tingkat kemandirian keuangan daerah baik, tingkat ketergantungan daerah sangat tinggi, tingkat desentralisasi fiskal sedang, tingkat efisiensi pengelolaan keuangan daerah tidak efisien, tingkat pertumbuhan (*growth*) PAD sangat rendah dan tingkat peranan (*share*) masih sedang.

Menurut Mahsun, Firma dan Heribertus (2011:81), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah daftar yang memuat rincian penerimaan daerah dan pengeluaran/belanja daerah selama satu tahun. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah untuk masa satu tahun, mulai dari 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 Pasal 1 Ayat 1, pengertian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.

Penelitian Rahmatina (2011) yang berjudul “Analisis Rasio Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2005–2009”. Hasil yang didapat dalam penelitian tersebut adalah: a. Kemandirian Pemerintah Kota Bandung dalam memenuhi kebutuhan dana untuk penyelenggaraan tugas – tugas pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan sosial masyarakat masih berada pada kemampuan keuangan yang rendah; b. Dalam merealisasikan pendapatan daerahnya, Pemerintah Kota Bandung sudah dapat dikategorikan efektif dan efisien; c. Berdasarkan perhitungan pada rasio aktivitas, dapat disimpulkan bahwa Pemerintah kota Bandung masih memprioritaskan anggarannya untuk mencukupi Belanja Rutin dibandingkan Belanja Pembangunan; d. Menurut hasil perhitungan DSCR yang memenuhi syarat untuk melakukan pinjaman adalah Tahun Anggaran dengan maksimal angsuran pokok pinjaman Rp 32.394.659.049,60. Sedangkan untuk Tahun Anggaran yang lain, tidak boleh meminjam lagi karena DSCR di bawah 2,5; e. Rasio pertumbuhan PAD menunjukkan angka yang meningkat setiap tahunnya. Sedangkan untuk Rasio pertumbuhan belanja pembangunan tahun anggaran 2006 sempat terjadi penurunan, namun pada 3 (tiga) Tahun Anggaran berikutnya mengalami peningkatan jumlah nominal belanja pembangunan.

Penelitian Juddy & Jenny (2017) yang berjudul Analisis Rasio Keuangan Anggaran Pendapatan Daerah Kota Manado Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Manado Tahun Anggaran 2011–2015. Hasil yang di dapat ditarik dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.1.Berdasarkan hasil perhitungan normatif dan analisis Kinerja Keuangan Daerah, bahwa pola hubungan tingkat kemandirian daerah berada pada kriteria instruktif. Kemandirian Pemerintah Kota Manado berada pada kemampuan keuangan yang masih sangat rendah dalam memenuhi kebutuhan dana untuk penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan sosial masyarakat. Ini terlihat dari hasil rata-rata Rasio Kemandirian Kota Manado Tahun Anggaran 2011-2015, berdasarkan pengolahan data yang berasal dari LRA Pemerintah Kota Manado Tahun Anggaran 2011-2015 adalah sebesar 20,877%. Ini menunjukkan bahwa, peran Pemerintah Pusat sangat dominan dalam pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah Kota Manado. Mengingat peran Pemerintah Pusat yang masih sangat dominan, wajar jika Derajat Desentralisasi Fiskal Pemerintah Daerah Kota Manado masih kurang. Ini terlihat darirata-rata Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal selama periode 5 tahun yaitu

sebesar 17,240%. Artinya, Pemerintah Pusat memberikan kewenangan dan tanggung jawab yang kecil kepada Pemerintah Daerah Kota Manado. Namun, tingkat efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah Kota Manado terbilang efektif dan sangat efisien. Ini terlihat dari tingginya nilai rata-rata Rasio Efektivitas yaitu sebesar 99,864% dan rendahnya nilai rata-rata Rasio Efisiensi yaitu sebesar 0,835% selama periode 5 tahun anggaran. Rasio Keserasian Belanja menunjukkan bahwa antar belanja tidak langsung dan belanja langsung belum seimbang. Terbukti dari perhitungan Rasio Belanja Tidak Langsung dan Rasio Belanja Langsung, Pemerintah Daerah lebih banyak menggunakan dana untuk pengeluaran belanja yang tidak terkait dengan pelaksanaan kegiatan secara langsung daripada belanja yang terkait langsung dengan kegiatan. Semestinya Belanja Langsung lebih besar dari Belanja Tidak Langsung. 2.

Berdasarkan hasil perhitungan dan analisis Kemampuan Keuangan Daerah dapat disimpulkan, bahwa kondisi kemampuan keuangan Kota Manado masih belum ideal. Dilihat dari hasil perhitungan *share* dan *growth* terhadap LRA Pemerintah Kota Manado Tahun Anggaran 2011 sampai dengan 2015, maka diperoleh nilai rata-rata *Share* sebesar 18,792% dan rata-rata *Growth* sebesar 120,503%, sehingga posisi Kota Manado berada pada kuadran II yang berarti berada pada kondisi belum ideal. Hal ini berarti, Pemerintah Daerah Kota Manado masih harus menggali lebih dalam lagi potensi yang dimiliki daerah, sehingga dapat lebih meningkatkan PAD yang berperan besar dalam APBD. Dilihat dari hasil perhitungan Indeks Kemampuan Keuangan Kota Manado selama periode 5 tahun, skala indeks menunjukkan angka 0,577 yang berarti kemampuan keuangan Kota Manado tergolong tinggi. Tingginya tingkat kemampuan keuangan Pemerintah Daerah Kota Manado disebabkan oleh besarnya bantuan keuangan dari Pemerintah Pusat yang ditunjukkan pada analisis rasio kemandirian. Hal ini sangat bertolak belakang dengan amanat otonomi daerah yang menuntut kemandirian dan kewenangan Pemerintah Daerah dalam menjalankan urusan rumah tangganya.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif. Penelitian dengan menggunakan metode ini bertujuan untuk menggambarkan, meringkaskan berbagai kondisi, berbagai situasi atau berbagai fenomena realitas sosial yang ada di masyarakat yang menjadi objek penelitian dan berupaya menarik realitas itu ke permukaan sebagai suatu ciri, karakter, sifat, model, tanda atau gambaran tentang kondisi, situasi ataupun fenomena tertentu. Pendekatan yang digunakan adalah studi kasus, dimana merupakan penelitian mengenai manusia (dapat suatu kelompok, organisasi maupun individu), peristiwa, latar secara mendalam dan tujuan dari penelitian ini untuk mendapatkan gambaran yang mendalam tentang suatu kasus yang sedang diteliti. Pengumpulan datanya diperoleh dari wawancara, observasi dan dokumentasi (Sujarweni, 2014). Studi kasus adalah salah satu strategi dan metode analisis data kualitatif yang menekankan pada kasus-kasus khusus yang terjadi pada objek analisis. Dalam analisis studi kasus (seperti halnya analisis kualitatif pada umumnya), peneliti diberi kebebasan membangun struktur tulisan berdasarkan domain yang dikaji serta keinginan-keinginan peneliti tentang domain mana yang dikembangkan.

Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian tidak berpusat di satu tempat yang biasanya menjadi objek penelitian kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Padang dan data

yang diperoleh melalui penelitian langsung ke objek penelitian dan melalui *website*, Waktu penelitian dilakukan pada bulan April s.d Juni 2018.

Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini dilakukan pada Pemerintah Kota Padang dengan menggunakan data sekunder yang ditunjang dengan studi kepustakaan. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Belanja Daerah pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kota Padang pada tahun 2014–2018.

Metode Pengumpulan Data

Data yang dilakukan dengan cara melakukan pencatatan data yang bersumber dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Padangtentang APBD Kota Padang dari tahun 2014–2018, dengan mengumpulkan informasi dan studi pustaka dari buku-buku, literatur dan jurnal-jurnal yang berkaitan dengan penelitian ini.

Teknik Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono (2014), teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dalam penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka tidak mungkin akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Teknik pengumpulan data yang ditempuh dalam penelitian ini adalah melalui studi dokumentasi (*documentation*).Penelusuran data dari dokumen-dokumen instansi yang relevan dengan masalah pokok dan materi penelitian sebagai pendukung data penelitian yang tidak diperoleh dalam observasi dan wawancara. Data yang diperlukan dalam penelitian ini ada berupa; APBD Kota Padang tahun anggaran 2014 – 2018 dan gambaran umum Kota Padang serta data lain yang diperlukan terkait dengan metode analisis yang digunakan.

Definisi Operasional

1. Rasio kemandirian Keuangan daerah

Tingkat kemandirian keuangan daerah adalah ukuran yang menunjukkan kemampuan keuangan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat, yang diukur dengan rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap jumlah bantuan pemerintah pusat dan pinjaman.

Berikut formula untuk mengukur tingkat Kemandirian Keuangan Daerah :

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah (PAD)}}{(\text{Dana Perimbangan})} \times 100\%$$

Kriteria untuk menetapkan kemandirian keuangan daerah dapat dikategorikan seperti tabel berikut :

Tabel 2
Kriteria Penilaian Kemandirian Keuangan Daerah

Prosentase PAD terhadap Dana Perimbangan	KemandirianKeuangan Daerah
0,00% - 10,00%	SangatKurang
10,01% - 20,00%	Kurang
20,01% - 30,00%	Sedang
30,01% - 40,00%	Cukup
40,01% - 50,00%	Baik
>50,00%	SangatBaik

Sumber : Tim Litbang Depdagri – Fisipol UGM, 1991

2. Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah

Tingkat ketergantungan keuangan daerah adalah ukuran tingkat kemampuan daerah dalam membiayai aktifitas pembangunan daerah melalui optimalisasi PAD, yang diukur dengan rasio antara PAD dengan total penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tanpa subsidi (Dana Perimbangan). Dengan formulasi sebagai berikut:

$$\text{Rasio Ketergantungan} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah (PAD)}}{\text{Total Penerimaan APBD}} \times 100\%$$

Kriteria untuk menetapkan ketergantungan keuangan daerah dapat dilihat pada Tabel 3 berikut.

Tabel 3
Kriteria Penilaian Ketergantungan Keuangan Daerah

Prosentase PAD terhadap APBD	Ketergantungan Keuangan Daerah
0,00% - 10,00%	Sangat Rendah
10,01% - 20,00%	Rendah
20,01% - 30,00%	Sedang
30,01% - 40,00%	Cukup
40,01% - 50,00%	Tinggi
>50,00%	Sangat Tinggi

Sumber : Tim Litbang Depdagri – Fisipol UGM, 1991

3. Rasio Desentralisasi Fiskal

Tingkat Desentralisasi Fiskal adalah ukuran untuk menunjukkan tingkat kewenangan dan tanggung jawab yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan pembangunan. Tingkat desentralisasi fiskal dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan rasio PAD terhadap Total Penerimaan Daerah. Berikut formula untuk mengukur Desentralisasi Fiskal :

$$\text{Rasio Desentralisasi Fiskal} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah (PAD)}}{\text{Total Penerimaan Daerah (TPD)}} \times 100\%$$

Adapun kriteria untuk menetapkan ketergantungan keuangan daerah dapat dikategorikan seperti tabel berikut :

Tabel 4
Kriteria Penilaian Tingkat Desentralisasi Fiskal

Prosentase PAD terhadap Total Penerimaan Daerah	Tingkat Desentralisasi Fiskal
0,00% - 10,00%	Sangat Kurang
10,01% - 20,00%	Kurang
20,01% - 30,00%	Sedang
30,01% - 40,00%	Cukup
40,01% - 50,00%	Baik
>50,00%	Sangat Baik

Sumber : Tim Litbang Depdagri – Fisipol UGM, 1991

4. Rasio Efisiensi

Pengukuran Tingkat Efisiensi ini untuk mengetahui seberapa besar efisiensi dari pelaksanaan suatu kegiatan dengan mengukur input yang digunakan dan membandingkan dengan output yang dihasilkan yang memerlukan data-data realisasi belanja dan realisasi pendapatan. Berikut formula untuk mengukur tingkat efisiensi :

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Pengeluaran Belanja}}{\text{Pendapatan}} \times 100\%$$

Adapun kriteria untuk menetapkan efisiensi pengelolaan keuangan daerah dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Analisis Keuangan Pemerintah ... (Arnaldi, Yusra)

ISSN: 2556 - 2278

Tabel 5
Kriteria Penilaian Efisiensi Pengelolaan Keuangan Daerah

Prosentase Kinerja Keuangan	Kriterial
100,00 keatas	TidakEfisien
90,00% - 100,00%	KurangEfisien
80,00% - 90,00%	CukupEfisien
60,00% - 80,00%	Efisien
< 60%	SangatEfisien

Sumber : Tim Litbang Depdagri – Fisipol UGM, 1991

a. Rasio Keserasian Belanja, Rasio Belanja Tidak Langsung terhadap Total Belanja

$$= \frac{\text{Total Belanja Tidak Langsung}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

Tabel 6
Kriteria Penilaian Efisiensi Pengelolaan Keuangan Daerah

Prosentase Kinerja Keuangan	Kriteria
< 60%	TidakEfisien
60,00% - 80,00%	KurangEfisien
80,00% - 90,00%	CukupEfisien
90,00% - 100,00%	Efisien
100,00 keatas	SangatEfisien

Sumber : Tim Litbang Depdagri – Fisipol UGM, 1991

b. Rasio Keserasian Belanja, Belanja Langsung terhadap Total Belanja

$$= \frac{\text{Total Belanja Langsung}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

Tabel 7
Kriteria Penilaian Efisiensi Pengelolaan Keuangan Daerah

Prosentase Kinerja Keuangan	Kriteria
< 60%	TidakEfisien
60,00% - 80,00%	KurangEfisien
80,00% - 90,00%	CukupEfisien
90,00% - 100,00%	Efisien
100,00 keatas	SangatEfisien

Sumber : Tim Litbang Depdagri – Fisipol UGM, 1991

5. Analisis Peta Kemampuan Keuangan Daerah berdasarkan Metode Kuadran

Untuk menggambarkan Peta Kemampuan Keuangan Pemerintah Kota Padang di gunakan parameter perhitungan dan analisis kinerja PAD melalui ukuran pertumbuhan (growth) dari masing-masing PAD dan melalui analisis peranan (share).

a) **Analisis pertumbuhan (growth) PAD merupakan angka pertumbuhan PAD setiap tahunnya menggunakan rumus yang ada dibawah ini.**

$$\text{Growth} = \frac{\text{PAD } i - \text{PAD } i-1}{\text{PAD } i-1} \times 100\%$$

Keterangan :

PAD_i = Pendapatan Asli Daerah periode i

PAD_{i-1} = Pendapatan Asli Daerah periode i-1

Tabel 8
Kriteria Analisis Pertumbuhan PAD

Prosentase PAD	Kriteria Analisis Pertumbuhan PAD
0,00% - 10,00%	SangatRendah
10,01% - 20,00%	Rendah
20,01% - 30,00%	Sedang
30,01% - 40,00%	Cukup
40,01% - 50,00%	Tinggi
>50,00%	SangatTinggi

Sumber : Tim Litbang Depdagri – Fisipol UGM, 1991

b) Analisis peranan (share), yaitu rasio PAD terhadap belanja tidak langsung dan belanja langsung (total belanja) yang berada pada APBD.

Dimana rasio ini berguna untuk melihat kapasitas kemampuan keuangan daerah untuk membiayai kegiatan rutin dan kegiatan pembangunan. Adapun rumus untuk menghitung share adalah :

$$\text{Share} = \frac{\text{PAD}}{\text{T. Belanja}} \times 100\%$$

Selanjutnya dengan parameter share and growth tersebut dapat digambarkan dalam bentuk suatu peta kemampuan keuangan daerah dengan menggunakan metode kuadran.

Tabel 9
Kriteria Analisis Peranan (share)

Prosentase Share	Kriteria Analisis Peranan
0,00% - 10,00%	SangatRendah
10,01% - 20,00%	Rendah
20,01% - 30,00%	Sedang
30,01% - 40,00%	Cukup
40,01% - 50,00%	Tinggi
>50,00%	SangatTinggi

Sumber : Tim Litbang Depdagri – Fisipol UGM, 1991

Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan Analisis Rasio Keuangan terhadap APBD Kota Padang Tahun Anggaran 2014 - 2018. Tahap-tahap yang dilakukan dalam menganalisis data ini antara lain:

- Menghitung rasio keuangan berdasarkan data yang diperoleh dengan membuat tabel.
- Membuat diagram batang dari hasil perhitungan rasio keuangan dari setiap periode.
- Mendeskripsikan data dari hasil perhitungan rasio keuangan.

PEMBAHASAN

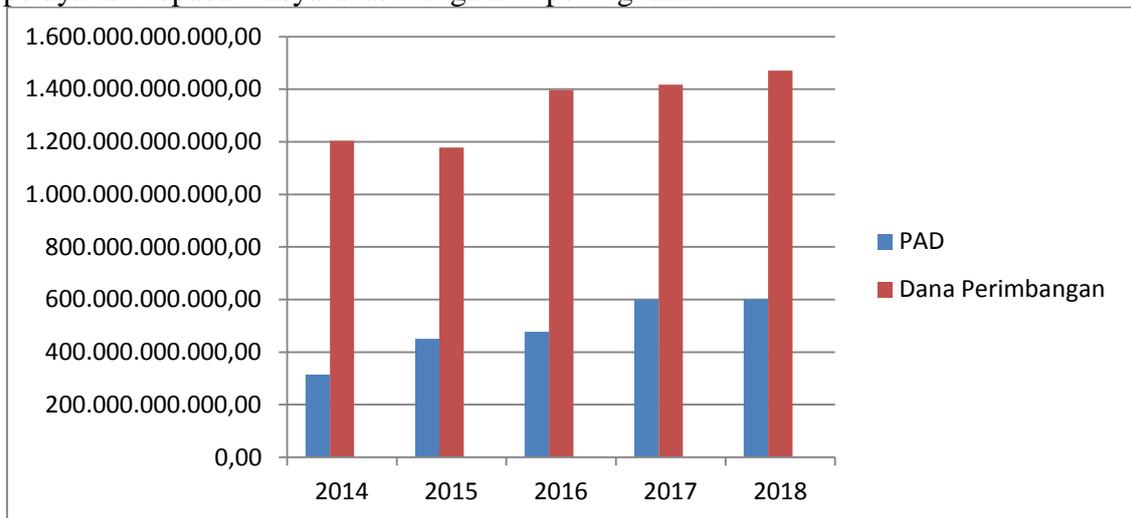
1) Analisis Kinerja Keuangan Daerah

1. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Tabel 10
Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

N o.	Tahun Anggaran	PAD	Dana Perimbangan	Nilai	Keterangan
1.	2014	315.065.010.119,00	1.203.006.164.906,00	26,19 %	Sedang
2.	2015	451.050.259.655,00	1.178.587.825.500,00	38,27 %	Cukup
3.	2016	476.983.714.816,00	1.396.549.173.836,00	34,15 %	Cukup
4.	2017	600.028.948.782,00	1.416.810.096.406,00	42,35 %	Baik
5.	2018	601.248.595.500,00	1.471.197.651.000,00	41,87 %	Baik

Tingkat kemandirian keuangan daerah Pemerintah Daerah Kota Padang adalah : Untuk tahun anggaran 2014 Sedang, dan tahun anggaran 2015 dan 2016 cukup, serta tahun anggaran 2017 dan 2018 mengalami baik. Sehingga rata-rata tingkat kemandirian keuangan daerah sebesar 36,57% atau cukup hal ini menunjukkan kemampuan keuangan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat mengalami peningkatan.



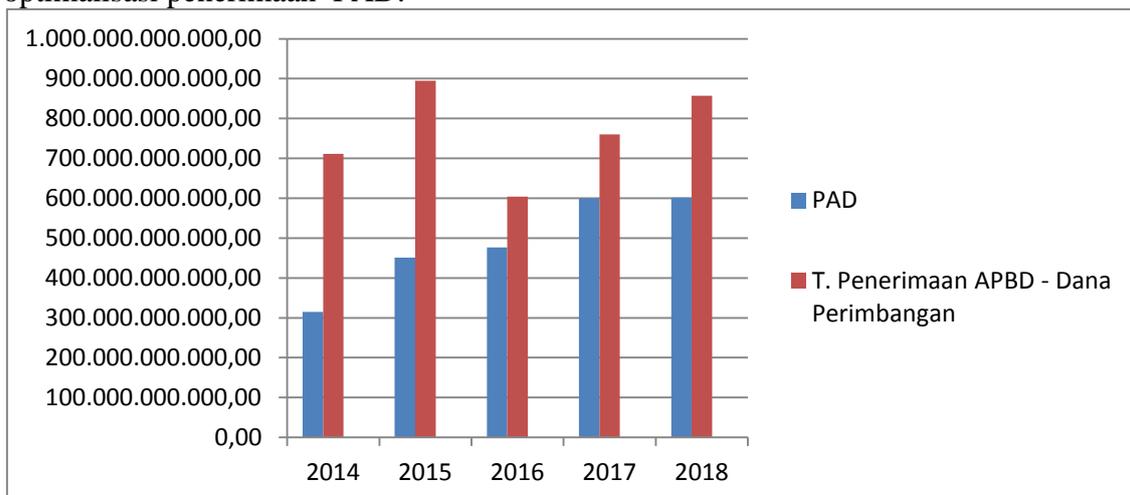
Tingkat pertumbuhan PAD dari tahun 2014 sampai dengan 2018 mengalami kenaikan dan dana perimbangan pada tahun 2015 mengalami sedikit penurunan dibandingkan dengan tahun 2014 dan tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 mengalami peningkatan, walaupun demikian peningkatan pertumbuhan dana perimbangan lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan PAD.

2. Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah

Tabel 11
Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah

No.	Tahun Anggaran	PAD	Total Penerimaan APBD – Dana Perimbangan	Nilai	Keterangan
1.	2014	315.065.010.119,00	710.984.438.119,00	44,31 %	Tinggi
2.	2015	451.050.259.655,00	894.310.924.655,00	50,43 %	SangatTinggi
3.	2016	476.983.714.816,00	604.324.307.660,00	77,64 %	SangatTinggi
4.	2017	600.028.948.782,00	760.281.259.782,00	78,92 %	SangatTinggi
5.	2018	601.248.595.500,00	856.677.128.500,00	70,18 %	SangatTinggi

Tingkat ketergantungan keuangan daerah Pemerintah Kota Padang adalah: tahun anggaran 2014 tinggi, dari tahun anggaran 2015 – 2018 sangat tinggi, Sehingga rata-rata tingkat ketergantungan Pemerintah Kota Padang adalah 64,30% sangat tinggi dalam membiayai aktifitas pembangunan daerah melalui dana perimbangan maka dilakukan optimalisasi penerimaan PAD.



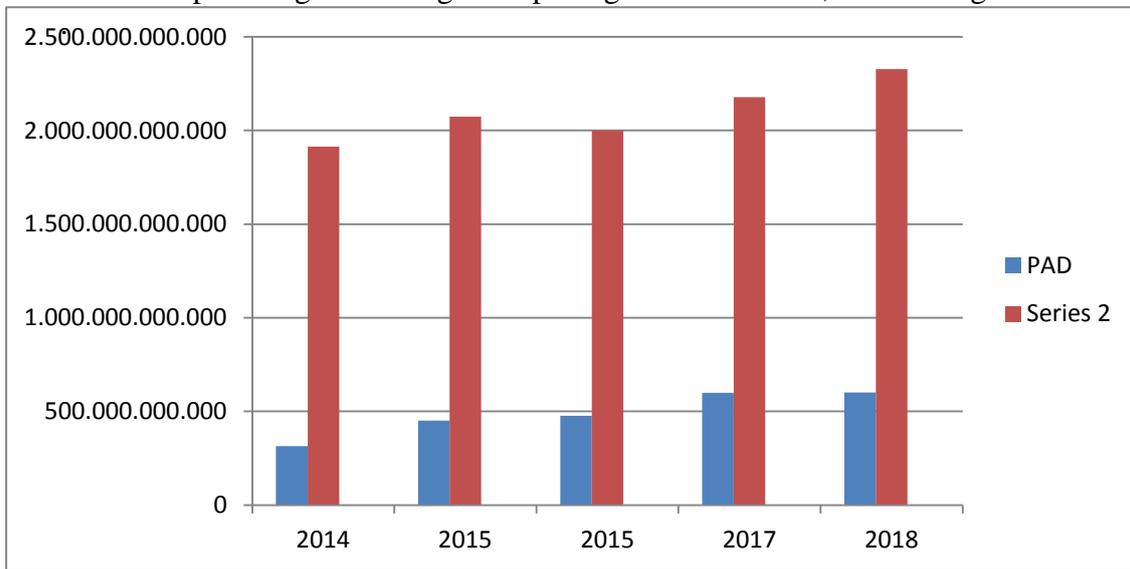
Tingkat pertumbuhan PAD dari tahun 2014-2018 mengalami kenaikan sedangkan total penerimaan APBD tidak termasuk dana perimbangan tahun 2014-2015 mengalami peningkatan, tahun 2016 mengalami penurunan dan tahun 2017-2018 mengalami peningkatan.

1. Rasio Desentralisasi Fiskal

Tabel 12
Rasio Desentralisasi Fiskal

No.	Tahun Anggaran	PAD	Total Penerimaan Daerah	Nilai	Keterangan
1.	2014	315.065.010.119,00	1.913.990.603.025,00	16,46 %	Kurang
2.	2015	451.050.259.655,00	2.072.898.750.155,00	21,76 %	Sedang
3.	2016	476.983.714.816,00	2.000.873.481.496,00	23,84 %	Sedang
4.	2017	600.028.948.782,00	2.177.091.356.188,00	27,56 %	Sedang
5.	2018	601.248.595.500,00	2.327.874.779.500,00	25,83 %	Sedang

Tingkat Desentralisasi Fiskal Pemerintah Kota Padang adalah sbb : tahun anggaran 2014 kurang, dan tahun anggaran 2015 – 2018 Sedang. Sehingga rata-rata tingkat kewenangan dan tanggung jawab yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan pembangunan mengalami peningkatan adalah 23,09% sedang.



Tingkat pertumbuhan PAD dari tahun 2014 sampai dengan 2018 mengalami sedikit kenaikan sedangkan pertumbuhan total penerimaan daerah mengalami fluktuasi 2014-2015 mengalami peningkatan dan tahun 2016 mengalami penurunan serta tahun 2017-2018 mengalami peningkatan.

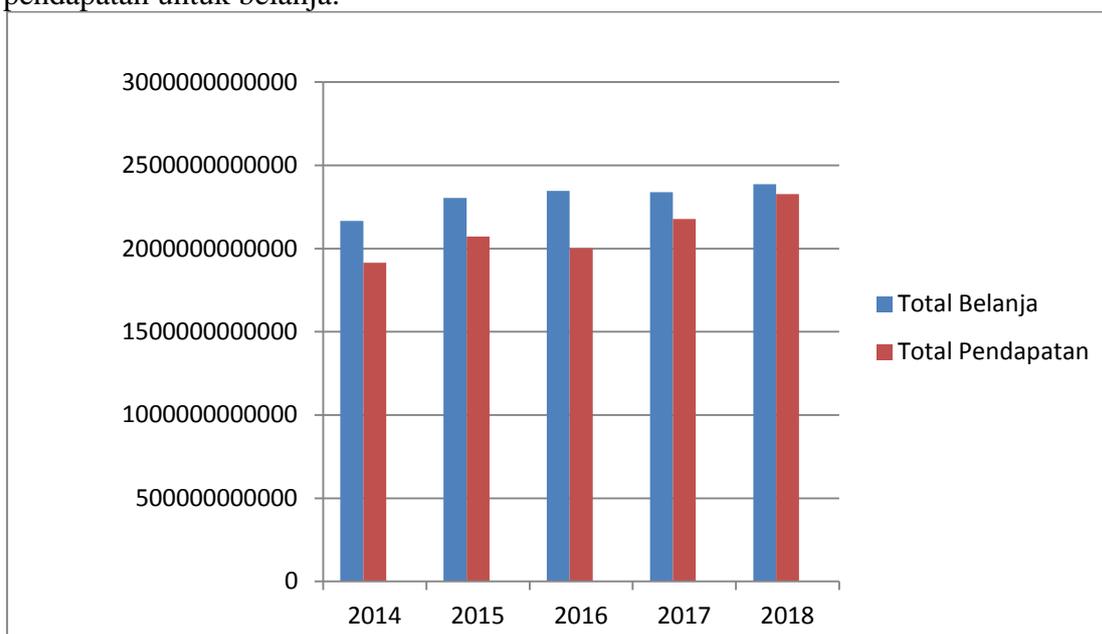
4. Rasio Efisiensi

Tabel 13
Rasio Efisiensi

No.	Tahun Anggaran	Total Belanja	Total Pendapatan	Rasio Efisiensi	Keterangan
1.	2014	2.166.166.603.025,00	1.913.990.603.025,00	113,17 %	TidakEfisien
2.	2015	2.303.776.915.505,00	2.072.898.750.155,00	98,00 %	KurangEfisien
3.	2016	2.345.757.224.592,62	2.000.873.481.496,00	117,24 %	TidakEfisien
4.	2017	2.339.522.587.754,21	2.177.091.356.188,00	107,46 %	TidakEfisien
5.	2018	2.387.533.525.597,00	2.327.874.779.500,00	102,56 %	TidakEfisien

Tingkat Efisiensi Pemerintah Kota Padang adalah sebagai berikut : tahun anggaran 2104 tidak efisien, dan tahun anggaran 2015 Kurang efisien serta tahun anggaran 2016 – 2018 tidak efisien sehingga rata-rata tingkat efisiensi Pemerintah daerah Kota Padang pelaksanaan suatu kegiatan dengan mengukur input yang digunakan dan membandingkan

dengan output adalah 107,69% tidak efisien karena lebih banyak dana yang diperoleh dari pendapatan untuk belanja.



Tingkat pertumbuhan belanja daerah mengalami peningkatan dari tahun 2014-2016 dan tahun

2017 mengalami penurunan serta tahun 2018 mengalami peningkatan. Sedangkan pendapatan daerah tahun 2014-2015 mengalami peningkatan, tahun 2016 mengalami penurunan dan tahun 2017-2018 mengalami peningkatan.

daerah mengalami peningkatan.

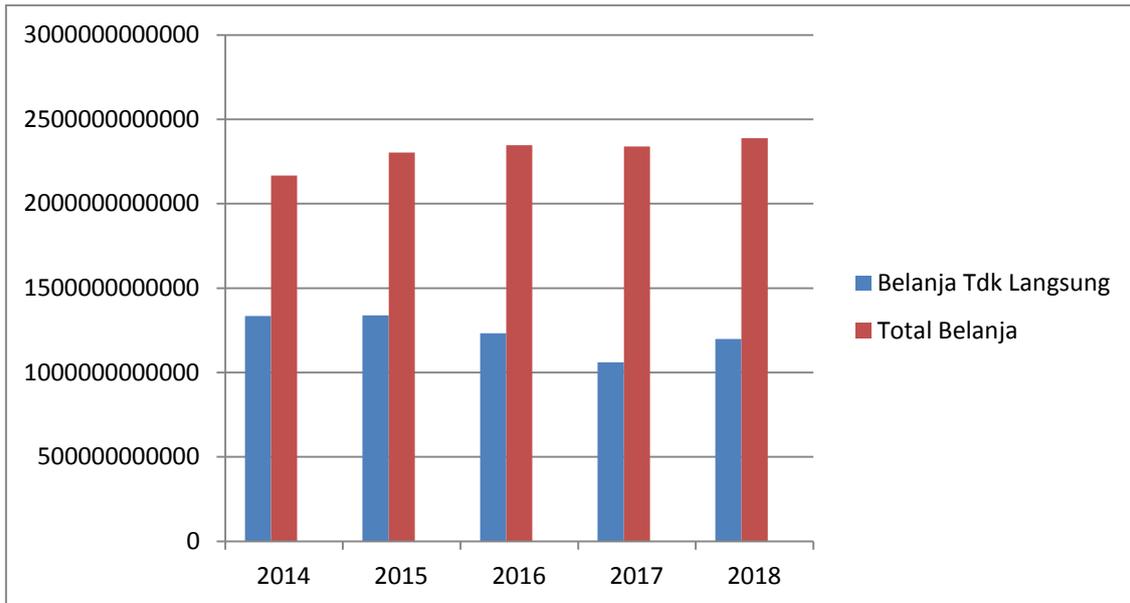
a. Rasio Keserasian Belanja, Rasio Belanja Tidak Langsung terhadap Total Belanja

Tabel 14

Rasio Keserasian Belanja, Rasio Belanja Tidak Langsung terhadap Total Belanja

No.	Tahun Anggaran	Belanja Tidak Langsung	Total Belanja	Rasio Keserasian Belanja	Keterangan
1.	2014	1.335.327.188.015,40	2.166.166.603.025,00	61,64 %	KurangEfisien
2.	2015	1.339.090.872.060,20	2.303.776.915.505,00	60,73 %	KurangEfisien
3.	2016	1.232.886.158.927,62	2.345.757.224.592,62	52,56 %	TidakEfisien
4.	2017	1.059.948.371.645,21	2.339.522.587.754,21	45,31 %	TidakEfisien
5.	2018	1.199.370.272.642,00	2.387.533.525.597,00	51,52 %	TidakEfisien

Tingkat efisiensi belanja tidak langsung terhadap total belanja Pemerintah Kota Padang adalah : tahun anggaran 2014 - 2015 kurang efisien, dan tahun anggaran 2016 - 2018 tidak efisien, sehingga rata-rata tingkat efisiensi belanja tidak langsung terhadap total belanja adalah 54,35% tidak efisien maka pelaksanaan suatu kegiatan belanja banyak digunakan untuk belanja tidak langsung dari total belanja.



Tingkat pertumbuhan belanja tidak langsung tahun 2014-2015 mengalami peningkatan dan tahun 2016-2018 mengalami penurunan walaupun tahun 2018 sedikit peningkatan. Sedangkan belanja daerah tahun 2014-2018 sedikit mengalami peningkatan.

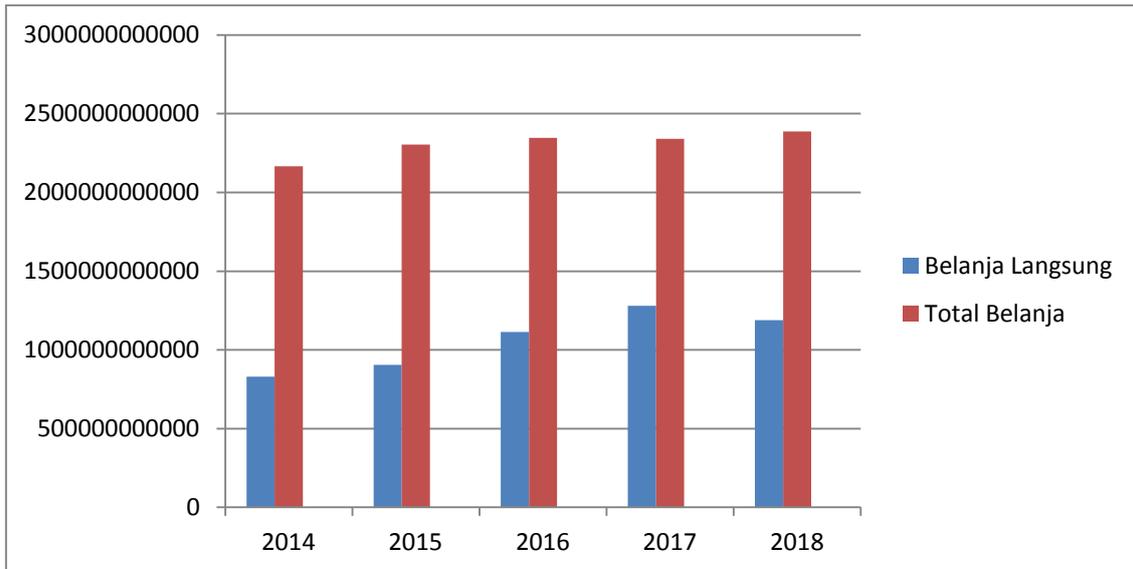
b. Rasio Keserasian Belanja, Belanja Langsung terhadap Total Belanja

Tabel 15

Rasio Keserasian Belanja, Rasio Belanja Langsung terhadap Total Belanja

No.	Tahun Anggaran	Belanja Langsung	Total Belanja	Nilai	Keterangan
1.	2014	830.839.415.009,60	2.166.166.603.025,00	38,35 %	TidakEfisien
2.	2015	904.686.043.444,80	2.303.776.915.505,00	39,27 %	TidakEfisien
3.	2016	1.112.871.065.665,00	2.345.757.224.592,62	47,44 %	TidakEfisien
4.	2017	1.279.574.216.109,00	2.339.522.587.754,21	54,69 %	TidakEfisien
5.	2018	1.188.163.252.955,00	2.387.533.525.597,00	49,76 %	TidakEfisien

Tingkat efisiensi belanja langsung terhadap total belanja Pemerintah Kota Padang adalah : tahun anggaran 2014 – 2018 tidak efisien, sehingga rata-rata tingkat Efisiensi belanja langsung terhadap total belanja Pemerintah Kota Padang adalah : tahun anggaran 2014 - 2018 adalah 45,90% tidak efisien, sehingga pelaksanaan suatu kegiatan kurang digunakan belanja langsung dan banyak digunakan belanja tidak langsung dari total belanja.



Tingkat pertumbuhan belanja langsung tahun 2014-2017 mengalami peningkatan dan tahun 2018 mengalami penurunan. Sedangkan belanja daerah sedikit mengalami peningkatan.

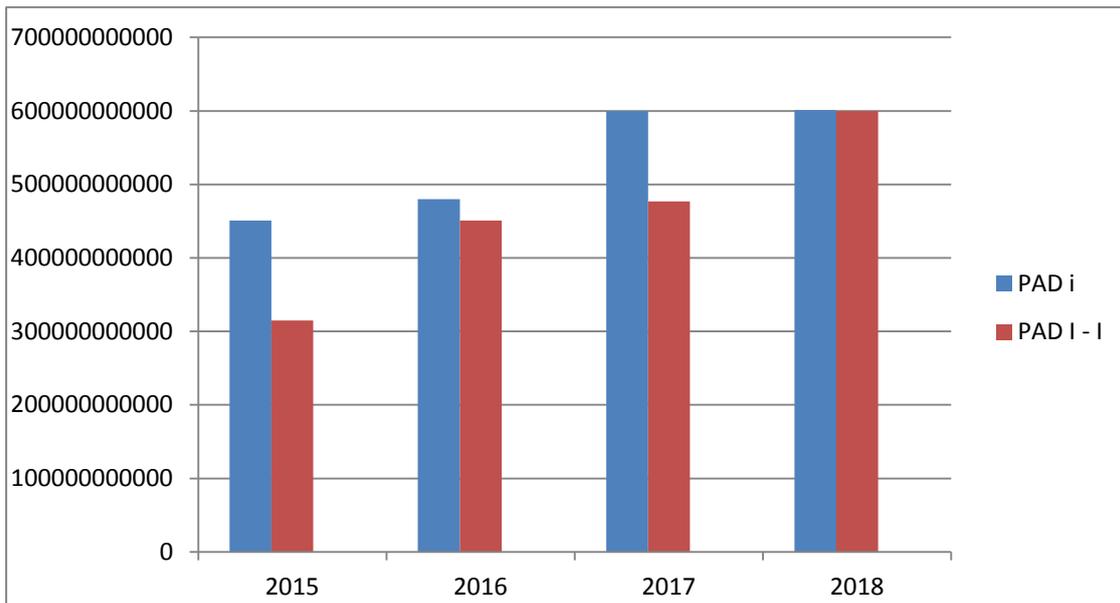
5. Analisis Peta Kemampuan Keuangan Daerah berdasarkan Metode Kuadran

a. Analisis pertumbuhan (*growth*) PAD merupakan angka pertumbuhan PAD setiap tahunnya.

Tabel 16
Angka Pertumbuhan (*Growth*) PAD Setiap Tahun

No	Tahun Anggaran	PAD i	PAD i-1	Nilai Pertumbuhan (<i>Growth</i>)	Keterangan
1.	2015	451.050.259.655,00	315.065.010.119,043,16 %		Tinggi
2.	2016	476.983.714.816,00	451.050.259.655,05,75 %		SangatRendah
3.	2017	600.028.948.782,00	476.983.714.816,025,80 %		Sedang
4.	2018	601.248.595.500,00	600.028.948.782,00,20 %		SangatRendah

Angka pertumbuhan PAD Pemerintah Kota Padang setiap tahunnya mengalami fluktuasi, dimana tahun anggaran 2015 tinggi, tahun anggaran 2016 sangat rendah, tahun anggaran 2017 sedang dan tahun anggaran 2018 sangat rendah. Sehingga rata-rata tingkat pertumbuhan PAD setiap tahunnya adalah 18,73% rendah. Maka diperlukan peningkatan penerimaan PAD dengan optimalisasi pemungutan PAD setiap tahunnya.



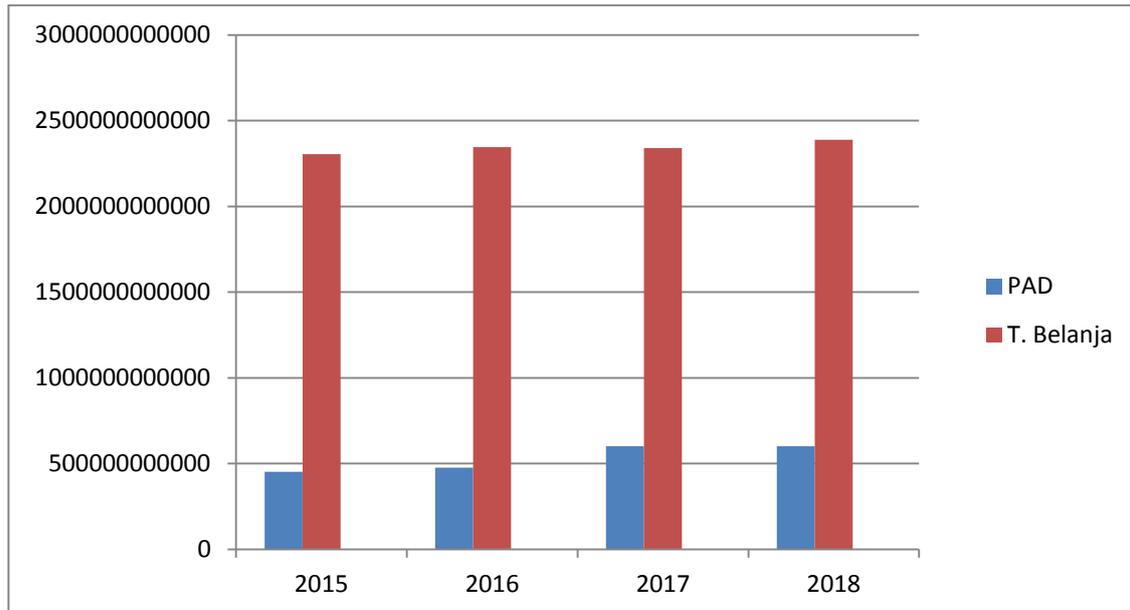
Tingkat pertumbuhan PAD tahun 2014-2018 mengalami peningkatan. Sedangkan pertumbuhan PAD sebelumnya mengalami peningkatan pula.

b. Analisis peranan (share), yaitu rasio PAD terhadap belanja tidak langsung dan belanja langsung (total belanja) yang berada pada APBD

Tabel 16
Rasio PAD terhadap belanja tidak langsung dan belanja langsung (total belanja) yang berada pada APBD

No	Tahun Anggaran	PAD	T. Belanja	Hasil Pertumbuhan (Growth) PAD	Keterangan
1.	2015	451.050.259.655,00	2.303.776.915.505,00	22,19 %	Sedang
2.	2016	476.983.714.816,00	2.345.757.224.592,62	20,33 %	Sedang
3.	2017	600.028.948.782,00	2.339.522.587.754,21	25,65 %	Sedang
4.	2018	601.248.595.500,00	2.387.533.525.597,00	25,18 %	Sedang

Angka peranan (*Share*) PAD terhadap total belanja Pemerintah Kota Padang setiap tahunnya dari tahun 2014 - 2018 tetap mengalami sedang. Sehingga rata-rata tingkat peranan PAD terhadap belanja adalah 23,34% sedang. Maka perlu ditingkatkan penerimaan PAD untuk belanja.



Tingkat pertumbuhan PAD tahun 2014-2018 mengalami peningkatan. Sedangkan pertumbuhan belanja daerah mengalami peningkatan kecuali tahun 2017 sedikit mengalami penurunan.

<p>Kuadran III Share : Tinggi Growth : Sedang</p>	<p>Kuadran I Share : Tinggi Growth : Tinggi</p>
<p>Kuadran IV Share : Rendah Growth : Rendah</p>	<p>Kuadran II Share : Rendah Growth: Tinggi</p>

Gambar 1

Peta Kemampuan Keuangan Berdasarkan Metode Kuadran

Kuadran III :

Kondisi ini juga belum ideal. PAD mengambil peran besar dalam total belanja mempunyai peluang yang pertumbuhan PAD sedang, sumbangan PAD terhadap total belanja sedang namun pertumbuhan PAD rendah. dan daerah mempunyai kemampuan mengembangkan potensi lokal. Kondisi ini ditunjukkan dengan nilai peran (*share*) yang sedang dan pertumbuhan (*growth*) yang rendah.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil perhitungan normatif dan analisis Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Kota Padang dapat disimpulkan sebagai berikut.

1. bahwa pola hubungan tingkat kemandirian daerah berada berdasarkan kriteria Kemandirian Pemerintah Kota Padang berada pada kemampuan keuangan yang masih cukup dalam memenuhi kebutuhan dana untuk penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan sosial masyarakat. Ini terlihat dari hasil rata-rata Rasio Kemandirian Kota Padang Tahun Anggaran 2014-2018 adalah sebesar 36,57 %. Dan Berdasarkan perhitungan Hasil Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah Pemerintah Kota Padang Tahun Anggaran 2014 – 2018 masih sangat tinggi sebesar 64,30%. Ini menunjukkan bahwa, peran Pemerintah Pusat sangat dominan dalam pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah Kota Padang. Mengingat peran Pemerintah

Pusat yang masih sangat dominan, wajar jika Derajat Desentralisasi Fiskal Pemerintah Daerah Kota Padang sedang. Ini terlihat dari rata-rata Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal selama periode 5 tahun yaitu sebesar 23,09 %. Artinya, Pemerintah Pusat memberikan kewenangan dan tanggung jawab yang sedang kepada Pemerintah Daerah Kota Padang. Namun, tingkat efisiensi pengelolaan keuangan daerah Kota Padang terbilang tidak efisien. Ini terlihat nilai rata-rata Rasio Efisiensi selama periode 5 tahun yaitu sebesar 107,67 %. Rasio Keserasian Belanja menunjukkan bahwa antar belanja tidak langsung dan belanja langsung belum seimbang. Terbukti dari perhitungan Rasio Belanja Tidak Langsung terhadap total belanja sebesar 54,35 % tidak efisien dan Rasio Belanja Langsung terhadap total belanja sebesar 45,90 % tidak efisien, Pemerintah Daerah lebih banyak menggunakan dana untuk pengeluaran belanja yang tidak terkait dengan pelaksanaan kegiatan secara langsung dari pada belanja yang terkait langsung dengan kegiatan. Semestinya Belanja Langsung lebih besar dari Belanja Tidak Langsung.

2. Berdasarkan hasil perhitungan dan analisis Kemampuan Keuangan Daerah dapat disimpulkan, bahwa kondisi kemampuan keuangan Pemerintah Kota Padang masih belum ideal. Dilihat dari hasil perhitungan *share* dan *growth* terhadap APBD Pemerintah Kota Padang Tahun Anggaran 2014 sampai dengan 2018, maka diperoleh nilai rata-rata *growth* sebesar 18,73% dan rata-rata *Growth* sebesar 23,34 %, sehingga posisi Pemerintah Kota Padang berada pada kuadran III yang berarti berada pada kondisi juga belum ideal. Hal ini berarti, Pemerintah Daerah Kota Padang masih harus menggali lebih dalam lagi potensi yang dimiliki daerah, sehingga dapat lebih meningkatkan PAD yang berperan besar dalam APBD. Tingginya tingkat kemampuan keuangan Pemerintah Daerah Kota Padang disebabkan oleh besarnya bantuan keuangan dari Pemerintah Pusat yang ditunjukkan pada analisis rasio kemandirian dan rasio ketergantungan keuangan daerah. Hal ini sangat bertolak belakang dengan amanat otonomi daerah yang menuntut kemandirian dan kewenangan Pemerintah Daerah dalam menjalankan urusan rumah tangganya.

UCAPAN TERIMA KASIH

Peneliti mengucapkan terimakasih kepada Pemerintah Kota Padang atas support yang diberikan. Besar harapan kami penelitian ini dapat bermanfaat bagi masyarakat Indonesia serta dapat memperkaya ilmu pengetahuan. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada pimpinan STIE “KBP Padang yang telah memfasilitasi kami dalam melakukan penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Afriyeni, A., & Marlius, D. (2017). Analisis Pengaruh Harga Saham Perdana Terhadap Abnormal Return Yang Diterima Investor Studi Pada Bursa Efek Indonesia. <https://doi.org/10.31219/osf.io/8z7hx>
- Afriyeni, A., & Marlius, D. (2018). Analisis Pengaruh Informasi Prospektus Perusahaan Terhadap Initial Return Saham Pada Pasar Perdana Di Bursa Efek Indonesia. <https://doi.org/10.31219/osf.io/kt6c4>
- Afriyeni, A., & Marlius, D. (2019). Analisis Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan Pada Perusahaan Yang Listing Di Bursa Efek Indonesia. <https://doi.org/10.31219/osf.io/rv4qf>

- Afriyeni, A., & Marlius, D. (2019). Analisis Tingkat Pengembalian Dan Risiko Investasi (Studi Pada Industri Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia). <https://doi.org/10.31219/osf.io/cfb92>
- Arifin, I. Z., & Marlius, D. (2017). Analisis Kinerja Keuangan PT. Pegadaian Cabang Ulak Karang. <https://doi.org/10.31227/osf.io/n2peu>
- Ayu, P. Rahmizal, M. (2018). Impact of unbalanced economic growth to dynamic trade specialization. *Theoretical & Applied Economics* 25 (3)
- Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS). (2003). *Peta Kemampuan Keuangan Provinsi Dalam Era Otonomi Daerah*. Direktorat Pengembangan Otonomi Daerah.
- Dona, E. (2013). Kajian Pendapatan Asli Daerah Ditinjau Dari Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan Kasus Kabupaten Pesisir Selatan. *Buletin Ilmiah Keuangan Dan Perbankan*, 223-246.
- Eliza, Y. (2015). Pengaruh Investasi, Angkatan Kerja dan Pengeluaran Pemerintah terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Sumatera Barat. *PEKBIS (Jurnal Pendidikan Ekonomi Dan Bisnis)* 7 (3), 198-208
- Juddy, J. P., & Jenny, M. (2017). Analisis Rasio Keuangan Anggaran Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah Kota Manado Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Manado Tahun Anggaran 2011 – 2015. *Jurnal Accounting*, 06(01), 45–46.
- Martha, L. (2018). Peranan Analisis Laporan Keuangan terhadap Pengambilan Keputusan Pemberian Kredit Pada PT. BPR LPN Sungai Rumbai Kabupaten Dharmasraya. *INA-Rxiv*.
- Rahmatina, A. Z. N. (2011). Analisis Rasio Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2005- 2009. *Skripsi: Institut Manajemen Telkom Bandung*.
- Rahmayeli, D. S., & Marlius, D. (2017). Analisis Kinerja Keuangan Pada PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Batang Kapas Pesisir Selatan. <https://doi.org/10.31227/osf.io/sz5db>
- Shanjaya, A. R., & Marlius, D. (2017). Peranan Laporan Keuangan Dalam Kebijakan Pemberian Kredit Kepada Calon Nasabah Pada PT. BPR Batang Kapas. <https://doi.org/10.31227/osf.io/uxmg6>
- Saputra, J., & Martha, L. (2019). Analisis Kinerja Keuangan Dan Nilai Perusahaan, Serta Pengaruhnya Terhadap Harga Saham. *INA-Rxiv*.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sujarweni, V. W. (2014). *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Ulum, I. (2009). *Audit Sektor Publik*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Yusra, I. (2016). Kemampuan Rasio Likuiditas dan Solvabilitas dalam Memprediksi Laba Perusahaan: Studi Empiris pada Perusahaan Telekomunikasi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Benefita*, 1(1), 33–42. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.22216/jbe.v1i1.878>